

**EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR  
ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Povi Nasari**

**Pembimbing: Zulkarnaini**

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*Povi Nasari, Effectiveness Of The administration-aware indonesian movement Program In The procurement Of Population documents in the Of Pekanbaru City. Supervised by the Mr.Zulkarnaini. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the GISA program in the procurement of population documents at the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office and to analyze the factors that hinder the achievement of the effectiveness of the GISA program in the procurement of population documents. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the effectiveness of the GISA program has been achieved while the inhibiting factors for the success of the GISA program are: 1) Program socialization is not optimal, and 2) Lack of public knowledge in using the Pekanbaru City Disdukcapil website. Suggestions put forward to support the success of the program are that the Department of Population and Civil Registration of Pekanbaru City be more proactive in disseminating the GISA program and good cooperation between stakeholders to support the GISA program.*

*Keywords: Effectiveness, GISA Program, Population Documents.*

### **1.1 Latar Belakang**

Kependudukan merupakan basis utama dari semua persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral terkait dengan penduduk atau dengan kata lain penduduk sebagai subyek sekaligus merupakan obyek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Oleh karena itu, dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ditangani oleh suatu instansi yang disertai wewenang untuk memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan. Pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi instansi pemerintah maupun swasta. Kualitas yang diberikan oleh instansi tersebut akan berbanding lurus dengan perkembangan instansi tersebut, semakin berkualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen maka kemungkinan besar instansi tersebut akan berkembang, dan sebaliknya apabila instansi tersebut memberikan pelayanan yang kurang memuaskan kepada masyarakat maka kemungkinan besar instansi tersebut lambat berkembang. Sesungguhnya yang menjadi produk organisasi pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan secara profesional. Pelayanan publik yang profesional, artinya suatu pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi pelayanan atau pemerintah. Pelayanan publik merupakan suatu faktor keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa dan diselenggarakan oleh pemerintah dengan Administrasi publiknya melalui pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah Administrasi Kependudukan.

Secara umum Administrasi Kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan

kepada penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan.

2. Fungsi registrasi, yaitu memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kependudukan.

Merujuk pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa definisi administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Oleh sebab itu, kesadaran publik terhadap administrasi kependudukan sangat penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan terutama dalam hal kependudukan. Dengan adanya data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat menyalurkan berbagai macam program – program untuk mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan publik.

Peningkatan Jumlah penduduk menyebabkan pengurusan administrasi kependudukan di Indonesia menjadi tumpang tindih. Pada akhir tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan kebijakan e-KTP untuk mempermudah proses pendataan penduduk yang semakin banyak seiring dengan diterapkannya konsep good governance yang diterapkan pemerintah (Masrukah dkk, 2016). Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsive, efektif,

dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek pemerintahan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja.

Oleh sebab itu untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program GISA yang telah diterapkan sejak tahun 2018 lalu hingga saat ini diperlukan tinjauan kembali terkait pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program GISA serta. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program GISA dalam Pengadaan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang menghambat tercapainya efektivitas program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat tercapainya efektivitas program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan memperkaya penelitian ilmiah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam kajian implementasi kebijakan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Pekanbaru serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kependudukan berbasis elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

## **1.5 Konsep Teori**

### **1.5.1 Teori Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Rosalina, 2012:8). Menurut Nainggolan (2016:4) efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah

ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut pendapat Kurniawan (2009:84) yang mengutip pernyataan James L. Gibson menyebutkan bahwa ukuran efektivitas tersebut antarlain :

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana, dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun menurut Sutrisno (2011:45) terdapat empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas suatu organisasi yaitu:

a. karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi.

b. karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

c. karakteristik karyawan.

d. kebijakan praktik manajemen.

Handayani (2017:28) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri.

### 1.5.2 Efektivitas Program

**Bohari** dalam **Tabroni (2012:28)** membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

a. Pengawasan Preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif ini bertujuan:

- a) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan
  - b) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
  - c) Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai
  - d) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sesuai instansi sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan
- b. Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk :

- a) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan

Menurut Raihani (2015:86) adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai

tujuan yang diharapkan. Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari program yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti yaitu telah berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

### 1.5.3 Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Budiono, 2003:60).

Hasibuan (2003:26) menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain.

Pelayanan publik oleh Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pelayanan publik terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

#### 1. Kelompok pelayanan administrative

Merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik

#### 2. Kelompok Pelayanan Barang

Merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas – tugas yang dilaksanakan oleh negara selaku pelaku usaha yang kewenangannya

dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### 3. Kelompok Pelayanan Jasa

Merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penyelenggaraan lainnya.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata karena dapat dinilai pelaksanaannya secara langsung oleh publik berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakatnya (Mulyadi, 2016:191).

#### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No. 464 Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru karena, Salah satu daerah yang melaksanakan program GISA sesuai dengan intruksi Kementerian Dalam Megeri adalah Kota Pekanbaru.. Pelaksana langsung dari program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) , dimana program GISA merupakan salah satu program untuk membangun ekosistem bagi semua pihak, masyarakat, pemerintah dan lembaga pengguna, akan pentingnya sadar Administrasi Kependudukan.

#### 1.6.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak – pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang hendak diteliti yaitu mengenai Efektivitas Program GISA dalam Pengadaan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.Oleh karena itu penelitian menetapkan informan – informan yang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
2. Kepala Sistem Informasi Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
3. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
4. Masyarakat

#### 1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai antaralain sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah diwawancarai atau ditemui oleh peneliti. Informasi yang dijadikan data penelitian adalah informasi yang relevan dengan topic bahasan penelitian sehingga akan menjawab permasalahan – permasalahan penelitian yang telah diuraikan. Adapun data primer ini diperoleh dari:

- a) Melalui observasi di Lapangan yang berkaitan dengan pengadaan dokumen kependudukan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- b) Melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari penyaji data utama. Data tersebut berupa penunjang informasi penelitian agar lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya yang terjadi pada lokasi penelitian. Sumber data ini diperoleh dari bahan kepustakaan, dokumen informasi mengenai struktur organisasi, buku dan informasi lainnya yang disajikan di Situs Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber untuk memperoleh informasi mengenai Efektivitas Program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Wawancara

wawancara menurut Creswell (2010) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (face to face), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan didefinisikan oleh Idrus (2009) sebagai sebuah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Dalam bukunya, Creswell (2010) mengatakan bahwa peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi non partisipan (pengamat).

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi data yang sudah didapatkan peneliti melalui proses observasi, wawancara dan survey hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang sedang peneliti lakukan, data yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi ini berupa foto, video dan rekaman wawancara dengan informan peneliti, file yang berkaitan dengan adanya informasi efektivitas Program GISA dalam Pengadaan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

### 1.6.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

## 2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 3. Penyajian Data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa efektivitas program GISA dalam pengadaan dokumen kependudukan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan

akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

### 1.6.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan yang sudah memiliki KIA.

#### Ketepatan sasaran

Program GISA mempunyai sasaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dalam hal dokumen kependudukan kepada masyarakat.

#### Sosialisasi Program

Dalam sosialisasi kemasyarakat mengenai program GISA dijelaskan

bagaimana mekanisme ini bekerja dari tingkat kecamatan sebagai pengkoordinasi hingga tingkat kelurahan sebagai pelaksana dan penggerak dan juga mengikutsertakan RT/RW masing-masing.

Tujuan program secara umum sudah tercapai, melihat tingginya angka dokumen kependudukan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru khususnya di Mall Pelayanan publik.

#### Pemantauan Program

Untuk pemantauan sendiri kita pihak dinas sosial sudah pernah melakukan pemantauan biasanya ini kita laksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT,RW, Lurah dan Kecamatan.

Faktor penghambat Efektivitas Program GISA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diantaranya adalah kualitas pelayanan sumber daya manusia yang masih sangat rendah serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

#### 1.6.6 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini serta identifikasi terhadap faktor penghambat Program Gisa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi berupa penyuluhan atau seminar yang berisi tentang pentingnya dokumen catatan sipil kepada masyarakat. Untuk Masyarakat harusnya mengubah pola pikir bahwa KIA itu tidak penting. Pola pikir seperti itu membuat pelaksanaan Program ini menjadi

lemah ditambah dengan tidak adanya sanksi dalam pelaksanaan program KIA. Hendaknya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA juga membuat beberapa sanksi kepada masyarakat jika tidak memiliki KIA.

#### a. Ketepatan sasaran

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari Program gerakan Indonesia Sadar Administrasi khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru perlu adanya hubungan komunikasi dengan stakeholder misalnya instansi pendukung yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dalam memberikan penekanan atau arahan kepada masyarakat.

#### b. Sosialisasi Program

Program GISA perlu dipahami oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu penyebaran informasi melalui sosialisasi kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat pada umumnya.

#### c. Tujuan Program

Berdasarkan pada Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tersebut diharapkan muncul perencanaan pembangunan dibidang administrasi kependudukan yang menyeluruh dan menyentuh setiap wilayah dengan sebuah sistem mekanisme yang

berkesinambungan dan pelayanan yang profesional.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program GISA agar dilakukan secara menyeluruh dari setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru agar tercapainya program GISA untuk memastikan Tujuan Program GISA tercapai dengan baik.

1. Untuk mendukung Efektivitas Program GISA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru disarankan agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan dokumen kependudukan yang menjadi dasar dari administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Khususnya. Dan dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2011. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Anton, Trianto. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dikota Palembang. Jurnal Akuntansi ISSN Online 2477-2984, hal 1-12.
- Andari, Dita Wuri. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaning (SFAE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas VIII SMP Nurul Islam". Semarang : Skripsi Dmipa Universitas Negeri Semarang
- Beni Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta : Taushia
- Bungin, Burhan. 2008 Sosiologi Komunikasi , Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, 2010. Research Design, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Darmawan.2020.Implementasi Program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) Pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Kalimantan Timur.
- Deddy. Mulyadi.2016.Studi Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA hlm 129-133
- Edy, Sutrisno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Jakarta, Kencana.
- Hanif Nurcholis. (2013). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Hardiansyah; 2011 Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta.
- Hasibuam Malayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta. PT Bumi Askara.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta:Erlangga.
- Katrina. (2017). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana

- Toraja. Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan, Feri, Landasan Hukum Bimbingan dan Konseling, Online, (<http://konselingindonesia.com>), diakses 28 mei 2013),2013
- Maduaba, Ida Bagus Gde,2007 Konsep Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia,Jakarta.EGC
- Mahmudi.(2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo.2009.Perpajakan edisi revisi 2009. Yogyakarta : Andi Offset
- Nainggolan G., 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi 5. Jakarta : InternalPublishing pp. 1094
- Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Public & Costumer Satisfication. Bandung.
- Pasolong, Harbani. (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta : Bandung
- Pekei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi. Cetakan Pertama. Jakarta : Taushia.
- Permendagri, Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/837/SJ Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Republik Indonesia.
- Pustaka Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005.Manajemen Pelayanan : Pengembangan model konseptual, penerapan citi'zen charter dan standar pelayanan minimal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pontoon, liando dan sampe 2017. Implementasi Kebijakan Program KPT Elektronik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
- Pranoto Juni, & Adam (ed). (2011). Strategi Pembaharuan Administrasi dan Manajemen Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setyadi.2019. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam Meningkatkan Kesadran Masyarakat untuk Mengurus Administrasi Kependudukan Gandul.
- Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Syahrudin. (2016). Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran)", Jurnal Ilmu EKonomi & sosial, Vol. VII, No. 02
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Aflabeta.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triningsih, Ayu. (2017). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan

Administrasi Kependudukan di  
Kabupaten Blitar. Skripsi Malang:  
Universitas Muhammadiyah  
Malang.

Zulkarnain Wildan dan Sumarsono.  
2018. Manajemen Dan Etika  
Perkantoran Praktik Pelayanna  
Prima. Bandung : PT Remaja Rosda  
Karya